

## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF SD DI KOTA BANJARMASIN

Imam Yuwono

Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: imam.plb@unlam.ac.id

**Abstrak:** Evaluasi implementasi program pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin bertujuan untuk mengkaji efektifitas program pendidikan inklusif dengan menganalisis peran masing-masing faktor sesuai dengan model pendekatan CIPPO (*context, input, process, product dan outcome*) Data dianalisis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Glickman,s dengan tipe kuadran. Temuan penelitian bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif SD di Banjarmasin terletak pada kuadran IV (kurang efektif) dilihat dari variabel *context* ( - + - + + ), *input* ( - + - + - - ), *process* ( - + + ), *product* ( + + ) dan *outcome* dengan hasil (+). Kontribusi efektif dominan didapat dari komponen *produkt dan outcome*. Sedangkan komponen *context* dua variabel berkontribusi kurang efektif (negatif) komponen *input* empat variabel berkontribusi kurang efektif (negatif) komponen *process* satu variabel berkontribusi kurang efektif (negatif).

**Kata Kunci:** evaluasi program, pendidikan inklusif, model evaluasi CIPPO

**Abstract:** Evaluation of the Implementation inclusive education program of elementary school in Banjarmasin Municipality aims to assess the effectiveness of inclusive education program by analyzing the role of each factor according to the approach Cippo Model(*context, input, process, product, and outcome*). Data were analyzed using qualitative descriptive technique developed by Glickman's the type quadrant. The study's findings that the implementation inclusive education program of Elementary School in the municipality of Banjarmasin located in quadrant IV (less effective) seen from the variable *context* ( - + - + + ), *input* ( - + - + - - ), *process* ( - + + ), *product* ( + + ) and the outcome with the result (+). Contributions effective dominant product derived from components and outcomes. While the components of the context of two variables contribute less effective (negative) component of the four input variables contribute less effective (negative) component of the process variables contribute less effective (negative).

**Keywords:** program evaluation, inclusive education, evaluation model Cippo

### PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia pendidikan Indonesia mengalami tambahan pengayaan dengan diperkenalkannya inklusi dalam pendidikan (pendidikan inklusif). Nilai penting pendidikan inklusif menurut pendapat di atas adalah terciptanya pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik, baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Sekolah tidak membedakan peserta didik, semua siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Hasil pengamatan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin belum menerapkan pembelajaran yang ramah bagi semua anak, persepsi sekolah yang penting bagaimana anak berkebutuhan khusus bisa masuk sekolah reguler. Bahkan banyak sekolah umum yang masih menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus. Kondisi riil di SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin masih belum mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah seperti yang tercantum pada undang-undang. Misalnya belum ada alur pembinaan yang jelas baik pemerintah pusat, propinsi maupun Kota.

Strukturisasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang mencakup siswa, guru, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, disusun agar dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan

program. Johnsen (2001) mengemukakan pendapat terkait dengan sikap sekolah menghadapi berbagai macam siswa dengan karakteristik yang beranekaragam. Berdasarkan hasil pengamatan SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, juga masih mengeluhkan cara modifikasi kurikulum, kompetensi guru masih rendah, sarana prasarana yang belum memadai, media pembelajaran khusus masih kurang, demikian juga jumlah ruangan kelas untuk kepentingan belajar mengajar. Latar belakang pendidikan dan pemahaman guru kelas tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif masih rendah.

Hasil riset yang dilakukan oleh Ahmad Sofyan, (2012) pelaksanaan pendidikan inklusif di sebuah SD di Kota Banjarmasin belum optimal, karena penerimaan sekolah reguler terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus masih rendah, ketersediaan sarana prasarana belum memadai. Penelitian yang dilakukan Imam Yuwono, (2013) para guru di SD penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, kemampuan dalam melakukan evaluasi hasil belajar masih rendah, cara identifikasi dan asesmen terhadap anak berkebutuhan khusus masih rendah. Hasil penelitian di atas mengindikasikan bahwa sekolah dasar di Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai terutama dalam hal penilaian hasil belajar. Di

satu sisi keberadaan program pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin belum pernah dievaluasi secara komprehensif, sehingga pihak Pemerintah maupun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seolah-olah mencari solusi sendiri berbagai macam masalah yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui efektifitas komponen konteks, yang mencakup landasan formal, tujuan dan pembinaan, kebutuhan masyarakat dan kelayakan sekolah. Komponen input, yang mencakup rekrutmen siswa, sosial ekonomi orang tua, persyaratan administrasi guru, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan. Komponen proses, yang mencakup kompetensi guru, minat guru mengajar dan poses belajar mengajar (KBM) di kelas inklusif. Komponen produk, yang mencakup: kognitif dan sikap sosial siswa di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Komponen outcome, berkaitan dengan kelanjutan studi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang mengacu kepada model evaluasi yang dikembangkan oleh D.L. Stufflebeam yang dikenal dengan model evaluasi CIPPO (*context, input, process, product* dan memperhatikan *outcome*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan model CIPPO dengan triangulasi terhadap data yang relevan dengan implementasi program pendidikan inklusif dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan interpretasi dan konversi pemetaan pencapaian indikator apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria evaluasi. Jika sesuai dengan kriteria evaluasi maka diberi tanda positif (+), jika tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan maka diberi tanda negative (-). Langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan kuadran sesuai dengan kriteria evaluasi yang sudah ditetapkan.

## HASIL

Efektifitas implementasi program pendidikan inklusif, tingkat sekolah dasar di Kota Banjarmasin, terlihat pada pemetaan data yang diperoleh pada hasil analisis komponen *context, input, process, product* dan *outcome* sebagai berikut:

1. SD Banua hanyar 8 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (+,+,+,+,+) komponen proses bernilai (+,+,-) komponen produk bernilai (+,+) komponen outcome bernilai (+).
2. SD Gadang 2 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (-,+,+,-,-) komponen proses bernilai (+,+,+) komponen produk bernilai (+,-) komponen outcome bernilai (+).
3. SD Banua Anyar 4 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (-

,+,+,+,-) komponen proses bernilai (-,+,-) komponen produk bernilai (+,-) komponen outcome bernilai (+).

4. SD Kuin Selatan 3 pada komponen konteks bernilai (+,-,+,-) komponen input bernilai (-,+,+,-,-) komponen proses bernilai (-,+,+) komponen produk bernilai (+,-) komponen outcome bernilai (+).

Hasil evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif keempat SD di Kota Banjarmasin, mengacu kepada prototype kuadran Glikman. Berdasarkan hasil pemetaan seperti tampak pada gambar 2 di atas menunjukkan kriteria CIPPO (+ - + - -). Tanda “+” berarti sesuai dengan kriteria evaluasi atau efektif, dan tanda “-” berarti tidak sesuai dengan kriteria evaluasi atau tidak efektif. Jika dikonversikan kedalam kuadran prototype Glikman, maka efektifitas implementasi program pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin terletak pada kuadran IV (keempat) atau kurang efektif atau kurang sesuai dengan kriteria evaluasi, artinya pada komponen *context* efektif (sesuai dengan kriteria evaluasi), pada komponen input tidak efektif (tidak sesuai dengan kriteria evaluasi), pada komponen proses efektif (sesuai dengan kriteria evaluasi), pada komponen product tidak efektif (tidak sesuai dengan kriteria evaluasi), dan pada komponen outcome efektif (sesuai dengan kriteria evaluasi). Dengan demikian, bahwa implementasi program pendidikan inklusif SD di Kota Banjarmasin tergolong kurang efektif atau kurang sesuai dengan kriteria evaluasi.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait evaluasi konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif di Banjarmasin, menemukan informasi bahwa keempat sekolah pada indikator tujuan kurang efektif (tidak sesuai kriteria evaluasi) pada indikator landasan formal efektif, pada indikator pembinaan kurang efektif dan indikator kebutuhan dan kelayakan sekolah kurang efektif. Indikator tujuan masih sangat dominan diarahkan untuk melindungi anak berkebutuhan khusus baik yang super dan yang under agar mereka memperoleh pendidikan di sekolah umum. Mereka mendapatkan perlakuan tanpa deskriminasi dalam hal pendidikan. Tujuan pendidikan inklusif yang tertera pada permendiknas No 70 tahun 2009 nampaknya sudah tidak cocok di era saat ini. Dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, ternyata juga akan mempengaruhi sikap dan mental peserta didik lain pada umumnya. Mereka lebih menghargai perbedaan, saling tolong menolong kerja sama dan saling membantu.

Landasan operasional pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin adalah permendiknas nomor 70 tahun 2009, ini di tindak-lanjuti oleh Direktorat pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) melalui buku Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif. Dokumen landasan formal ini dimiliki oleh keempat sekolah yang dievaluasi. Melalui berbagai

wawancara dari berbagai stakeholder sekolah, keempat sekolah memahami dengan baik isi landasan formal. Landasan formal dipahami warga sekolah dan memberikan manfaat dalam mencapai tujuan pendidikan inklusif. Hal ini senada dengan pendapat bahwa landasan yang memayungi pendidikan inklusif mampu memberikan manfaat untuk semua anak tanpa deskriminasi, membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.

Mekanisme pembinaan di tingkat pusat oleh Direktorat PKLK Dikdas, tingkat propinsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi cq. Kepala bidang bina SD, pada tingkat kotamadya/kabupaten ditangani oleh Subdin Dikdas Kotamadya/Kabupaten seksi SD, dan pada tingkat sekolah dibina langsung oleh kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kurikulum dan koordinator inklusif. Secara struktural kelembagaan memang telah jelas mekanisme atau alur pembinaan program pembinaan pendidikan inklusif dari tingkat pusat, daerah hingga unit sekolah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat indikasi adanya pembinaan yang longgar terutama pada aspek-aspek monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap sekolah penyelenggara program pendidikan inklusif. secara berkala dan terprogram sekurangnya setahun sekali.

Hasil evaluasi pada indikator analisis kebutuhan dan kelayakan sekolah menemukan informasi bahwa, Analisis kebutuhan pendidikan inklusif yang dilakukan melalui analisis SWOT terhadap empat sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin diperoleh data sebagai berikut: Kekuatan (Strength) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditandai dengan memiliki tim layanan sekolah yaitu program inklusi yang kuat, sekolah yang diminati masyarakat sebagai penyelenggara inklusi baik dari kalangan masyarakat di bawah sampai keatas, sekolah menjadi kebanggaan dan harapan orang tua anak berkebutuhan khusus dan masyarakat. Banyaknya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang memiliki komitmen kuat menyekolahkan anak diwilayah Banjarmasin, merupakan kekuatan yang sangat kuat yang mendorong sekolah inklusif ditunggu kehadirannya oleh banyak masyarakat.

Hasil evaluasi pada komponen masukan (Input) menemukan informasi bahwa proses rekrutmen siswa di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SD Banua Anyar 8, SD gadang 2, SD Banua Anyar 4, dan SD Kuin Selatan) masih kurang efektif. Indikator persyaratan administrasi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Banjarmasin masih belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar. Kurikulum pendidikan inklusif di SD Banua Anyar 8 dan SD Kuin Selatan sesuai dengan kriteria evaluasi artinya sekolah tersebut membuat kurikulum berdeferensiasi, berorientasi pada peserta didik, dan menyesuaikan kondisi anak. Sedangkan kurikulum di SD Banua Anyar 4 dan SD Gadang 2 kurang efektif, menunjukkan bahwa guru dalam mengembangkan

kurikulum belum berorientasi pada kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Ketersediaan sarana prasarana satu SD menunjukkan nilai efektif sedangkan di tiga SD kurang efektif (tidak sesuai kriteria evaluasi. Pada aspek pembiayaan menunjukkan keempat SD di Kota Banjarmasin masih kurang efektif. Sekolah belum memiliki standar pembiayaan per peserta didik, walaupun sudah memiliki RKAS yang memuat dana masuk dan keluar secara keseluruhan. Pendanaan sekolah masih belum bisa menopang kebutuhan sekolah.

Hasil evaluasi terhadap komponen proses, menemukan informasi bahwa: Kompetensi guru di SD Banua Anyar 8 dan SD Gadang 2 termasuk kategori baik yang artinya guru telah memiliki beberapa kompetensi antara lain deferensiasi kurikulum, modifikasi kurikulum, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, memotivasi belajar dan melakukan penilaian fleksibel, sedangkan di SD Banua Anyar 4 dan SD Kuin Selatan 3 menunjukkan kurang efektif. Kompetensi guru yang kurang efektif akan mempengaruhi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Senada dengan pendapat Michael bahwa kurikulum pendidikan inklusif harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan anak dan kondisi sekolah.

Hasil evaluasi terhadap komponen produk, menemukan informasi bahwa semua sekolah SD yang dievaluasi mengalami peningkatan nilai ujian nasional pada saat menjadi penyelenggara pendidikan inklusif, artinya inklusif di suatu sekolah tidak mempengaruhi nilai ujian nasional. Aspek sosial sekolah yang sudah lama menyelenggarakan pendidikan inklusif menunjukkan kriteria efektif, sedangkan pada sekolah yang baru menyelenggarakan pendidikan inklusif menunjukkan kriteria kurang efektif. Pendapat Abin Samsudin bahwa perilaku sosial seseorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi setelah sekian lama melakukan interaksi. Pendapat ini mengindikasikan bahwa semakin lama melakukan interaksi, siswa akan tumbuh nilai-nilai sikap sosial yang positif.

Hasil evaluasi terhadap komponen *outcome* menemukan informasi bahwa keempat SD inklusif yang dievaluasi memiliki *outcome* yang bagus, sesuai dengan kriteria evaluasi. Anak berkebutuhan khusus lulusan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagian besar bisa melanjutkan studi. Artinya dalam segi *outcome* penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin perlu terus didorong, untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terkait.

## KESIMPULAN

Pertama, komponen konteks: tujuan pendidikan inklusif yang tercantum dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 perlu ditinjau kembali karena sudah tidak layak dengan kebutuhan sekolah inklusif. Alur pembinaan baik ditingkat pusat, propinsi, Kota, tidak berjalan dengan baik karena tidak ada alur yang jelas.

Tingkat kebutuhan dan kelayakan sekolah efektif sesuai dengan kriteria evaluasi.

Kedua, komponen masukan (*input*) mencakup: Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus satu SD aktualitasnya baik, satu SD sedang dan dua SD rendah. Latar belakang sosial ekonomi orang tua keempat SD dalam skala menengah atau sedang. Pada aspek kurikulum yang relevan meliputi deferensiasi, berorientasi pada peserta didik, menggamit sikap sosial, fleksibel menyesuaikan kondisi anak, pada dua SD efektif dan pada dua SD menyatakan kurang efektif. Pada aspek sarana dan prasarana terdapat satu SD yang memiliki sarana dan prasarana lengkap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sedangkan tiga SD tidak memiliki sarana prasarana sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Pada aspek pembiayaan keempat SD masih rendah hanya mengandalkan biaya dari BOS, yang dirasakan sekolah masih belum mencukupi. Semua sekolah merasa keberatan menanggung honor guru pembimbing khusus.

Ketiga, komponen proses, aspek kompetensi guru di SD Banua Hanyar 8 dan di SD Gadang 2 efektif, sedangkan di SD Banua Anyar 4 dan di SD Kuin Selatan 3 kurang efektif. Aspek minat mengajar, semua SD di Banjarmasin memiliki minat yang baik (efektif) ditandai dengan senang, ikhlas tanpa pamrih, bangga dan sikap menerima terhadap siswa yang berkebutuhan khusus.

Keempat, produk kognitif diperoleh keempat sekolah SD di Banjarmasin Nilai ujian Nasional pada aktualitas meningkat. Artinya selama menyelenggarakan pendidikan inklusif tidak mempengaruhi nilai ujian nasional di sekolah itu. Pada aspek sikap sosial Di SD Banua Hanyar 8 yang merupakan SD paling lama menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki sikap sosial yang sangat baik, sedangkan tiga SD yang memang belum begitu lama menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki sikap sosial pada aktualitas cukup.

Kelima, Komponen outcome data yang diperoleh keempat SD di Banjarmasin memiliki aktualitas outcome yang tinggi yaitu 99% anak berkebutuhan khusus dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abin Syamsuddin Makmun. (2003) *Psikologi Pendidikan* (Bandung : PT Rosda Karya Remaja, 93
- Alimin, Zaenal. (2006) *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Reguler*. Bandung: Rineka Cipta, 105.
- Berit Johnsen. (2003) *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar* (Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- Daniel P. Hallahan. (2009) *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc., 202.
- Direktorat PSLB. (2009). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta: Direktorat PKLK, 102.
- Djaali, Puji Mulyono, dan Ramli. (2000) *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PPs UNJ, 97.
- D. Skorten, Marriam. (2003) *Menuju Inklusi Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah Pengantar*. Bandung: Program Pasca Sarjan UPI.
- George, F. Madaus, Michael S. Scriven, dan Daniel L. Stufflebeam. (1993) *Evaluation Models Viewpoints On Educational And Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer Nijhoff Publishing, 204.
- Imam Yuwono, (2011) *Sistem Penilaian Dalam Pendidikan Inklusif di SD Banua Hanyar 8 Banjarmasin* (Banjarmasin: Unlam Pers.
- James R. Sanders et all. (2004) *The Program Evaluation Standards* (California: Sage Publication Inc.
- Marhaeni. (2007) *Evaluasi Program Pendidikan*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 96.
- Mel Ainscow. (2003) *Developing inclusive education systems: what are the levers for change?*, (Paper to be presented at conference 'Inclusive Education: A Framework for Reform' in Hong Kong : The University of Manchester, 173.
- Sofyan. (2009) *Manajemen Pendidikan Inklusif di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Unlam Pers, 59.
- Stufflebeam. D. L. (2001) *Evaluation Model Viewpoints On Educational And Human Services Evaluation*. Boston: Kluwer Academic Publisher, 101.
- Sudarwan Darwin. (2001) *Inovasi pendidikan dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan*, (Bandung: pustaka setia, 94.